



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

Nomor : PW/ **13536** /DPR RI/IX/2021 30 September 2021  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar  
Perihal : Penugasan Pembahasan RUU

Yth. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI  
Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang dilaksanakan tanggal 27 September 2021, telah membicarakan surat-surat masuk dari Presiden RI, yaitu:

- a. Nomor: R-40/Pres/09/2021 tanggal 14 September 2021, hal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.
- b. Nomor: R-41/Pres/09/2021 tanggal 14 September 2021, hal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
- c. Nomor: R-42/Pres/09/2021 tanggal 14 September 2021, hal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;

Dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah menyetujui Pembahasan 3 (tiga) RUU tersebut **diserahkan kepada Badan Legislasi DPR RI** dan apabila pembahasan telah selesai, maka diharapkan untuk segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua DPR RI,



Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. ✍

Tembusan:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPR RI;
3. Deputi Bidang Persidangan;
4. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan;
5. Plt. Kepala Biro Persidangan II;
6. Kepala Bagian Set. Badan Legislasi.